



BUKU MODUL
LABORATORIUM
KEBIJAKAN PUBLIK

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

REKTORAT
UMS RAPPANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDENRENG RAPPANG

HALAMAN HAK CIPTA

Buku Modul Laboratorium Kebijakan Publik Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan

Penguatan Pembelajaran, Penelitian Terapan, dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Smart Village dan Digital Governance.

© 2025

Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Hak cipta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Seluruh atau sebagian isi buku modul ini dilarang diperbanyak, disimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan data, dialihmediakan, atau disebarluaskan dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, maupun melalui cara lainnya, tanpa izin tertulis dari Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Pengecualian diberikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu internal sepanjang mencantumkan sumber secara benar, menjaga integritas akademik, menghormati hak cipta pihak ketiga, serta melindungi data pribadi dan informasi yang bersifat terbatas atau rahasia. Buku modul ini disusun sebagai dokumen akademik internal Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan digunakan sebagai pedoman dalam:

Pelaksanaan pembelajaran berbasis laboratorium dan Outcome-Based Education;

1. Penguatan kompetensi mahasiswa dalam menganalisis, merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik;
2. Pelaksanaan penelitian terapan dalam bidang pemerintahan dan kebijakan publik;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis rekomendasi kebijakan;
4. Pengembangan kebijakan pemerintahan berbasis Smart Village dan Digital Governance;
5. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya; serta
6. Penyediaan bukti sahih pemanfaatan laboratorium untuk pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, akreditasi, dan penjaminan mutu berkelanjutan.

Setiap pengguna bertanggung jawab memastikan bahwa data, regulasi, kutipan, hasil analisis, dan rekomendasi yang digunakan dalam kegiatan laboratorium dapat diverifikasi. Penggunaan teknologi kecerdasan artifisial wajib diungkapkan secara transparan, diverifikasi oleh pengguna, serta tidak boleh menggantikan tanggung jawab akademik mahasiswa maupun dosen.

Kode Dokumen Internal

IP-LAB-KP-2025-001

Tahun Berlaku

2025-2029

Penerbit Internal

Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

METADATA BUKU MODUL

Komponen	Keterangan
Judul Buku	Buku Modul Laboratorium Kebijakan Publik
Subjudul	Penguatan Pembelajaran, Penelitian Terapan, dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis <i>Smart Village</i> dan <i>Digital Governance</i>
Program Studi	Sarjana Ilmu Pemerintahan
Fakultas	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Bidang Keilmuan	Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik
Keunikan Keilmuan	Kebijakan publik berbasis <i>Smart Village</i> , kewirausahaan digital, <i>Digital Governance</i> , tata kelola pemerintahan berdaya saing global, serta nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
Jenis Buku	Buku Modul Laboratorium Program Studi
Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan
Penyusun	Tim Laboratorium Kebijakan Publik Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan
Penelaah Akademik	Dosen Tetap Program Studi bidang Ilmu Pemerintahan, kebijakan publik, pemerintahan desa dan daerah, serta <i>Digital Governance</i>
Dasar Penyusunan	VMTS dan visi keilmuan Prodi; Kurikulum OBE; CPL dan RPS; Peta Jalan Laboratorium; SN-Dikti; SPMI Universitas; serta instrumen akreditasi LAMSPAK yang berlaku
Status Dokumen	Dokumen resmi program studi untuk pembelajaran, penelitian, PkM, akreditasi, dan penjaminan mutu internal
Tahun Berlaku	2025–2029
Siklus Peninjauan	Dievaluasi setiap tahun dan ditinjau paling lambat setiap empat tahun atau sesuai siklus PPEPP
Kode Dokumen Internal	IP-LAB-KP-2025-001
Penerbit Internal	Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Lokasi Penerbitan	Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan

LEMBAR PENGESAHAN

Buku Modul Laboratorium Kebijakan Publik ini ditetapkan sebagai acuan resmi pembelajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengendalian bukti penggunaan Laboratorium Kebijakan Publik pada Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Nomor SK/penetapan	
Tanggal penetapan	
Tanggal berlaku	
Lokasi dokumen induk	Repositori dokumen mutu Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun oleh,
Kepala Laboratorium Kebijakan Publik

Nama terang: Prof. Dr. Muliani S, S.I.P., M.Si.
NIDN: 0901067601

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Erfina, S.Sos., M.Si.
NIDN 0919058503

Dikendalikan oleh,
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan

Dr. Sandi Lubis, S.I.P., M.A.P.
NIDN 0930069203

Ditetapkan oleh,
Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NIDN 0907057001

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Buku Modul Laboratorium Kebijakan Publik Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang merupakan karya orisinal yang disusun oleh tim penyusun program studi dan bukan merupakan hasil plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya.

Penyusunan buku modul ini dilakukan berdasarkan

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan;
2. visi keilmuan Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan;
3. Kurikulum Outcome-Based Education dan Rencana Pembelajaran Semester;
4. Peta Jalan Laboratorium Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan;
5. Capaian Pembelajaran Lulusan;
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas; dan
8. instrumen akreditasi program studi LAMSPAK yang berlaku.

Buku modul ini disusun dengan mengacu pada sumber pustaka, regulasi, kebijakan institusi, dan praktik terbaik yang relevan. Seluruh sumber digunakan secara etis dan akademis serta dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Data, ilustrasi, instrumen, dan karya pihak lain yang digunakan dalam buku modul ini tetap menghormati hak cipta, perlindungan data pribadi, dan ketentuan kerahasiaan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap prinsip orisinalitas, integritas ilmiah, atau etika akademik dalam buku modul ini, kami bersedia bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan akademik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 2 Maret 2026

Penanggung Jawab,

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan




Dr. Sandi Lubis, S.I.P., M.A.P.

NIDN 0930069203

Mengetahui,

Rector Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang




Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.

NIDN 0907057001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Modul Laboratorium Kebijakan Publik Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku modul ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu akademik dan implementasi visi keilmuan Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, yaitu mewujudkan keunggulan Ilmu Pemerintahan berbasis Smart Village, kewirausahaan digital, dan tata kelola pemerintahan berdaya saing global. Orientasi tersebut diperkuat melalui pengembangan kebijakan publik berbasis bukti, Digital Governance, pemerintahan daerah dan desa, pelayanan publik.

Penyusunan buku modul ini menegaskan komitmen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dalam membangun ekosistem pembelajaran sarjana yang tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga penguatan kompetensi analitis dan aplikatif. Hal tersebut diwujudkan melalui pembelajaran berbasis kasus, simulasi kebijakan, penelitian terapan, serta pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Laboratorium Kebijakan Publik diposisikan sebagai wahana strategis untuk mengintegrasikan Capaian Pembelajaran Lulusan, profil lulusan, kurikulum OBE, Rencana Pembelajaran Semester, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui laboratorium ini, mahasiswa dilatih untuk mendiagnosis masalah pemerintahan, menganalisis bukti, memetakan aktor, merumuskan alternatif, menyusun policy brief, mengevaluasi kebijakan, dan mengomunikasikan rekomendasi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.

Buku modul ini disusun secara sistematis dengan mengacu pada VMTS dan visi keilmuan Program Studi, Kurikulum OBE, Peta Jalan Laboratorium, Capaian Pembelajaran Lulusan, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta instrumen akreditasi program studi LAMSPAK yang berlaku. Modul ini diharapkan menjadi pedoman operasional yang sah, terukur, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus menjadi bukti pelaksanaan penjaminan mutu melalui siklus PPEPP.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penyusun, pimpinan fakultas dan program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra pemerintah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku modul ini. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembelajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, pencapaian kompetensi lulusan, dan penguatan keunggulan Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan atas setiap ikhtiar kita dalam mengembangkan pendidikan tinggi yang unggul, berintegritas, berkarakter Islami, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah..

Sidenreng Rappang, 2026
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan



Dr. Sandi Lubis, S.I.P., M.A.P.

DAFTAR ISI

Bagian	Judul	Hal.
BAB I	Identitas, Landasan, dan Urgensi	1
BAB II	Tujuan, Profil Lulusan, dan Capaian	3
BAB III	Desain Pembelajaran Laboratorium	5
BAB IV	Unit Praktikum Laboratorium Kebijakan Publik	8
4.1	LKP-01 — Diagnosis Masalah Kebijakan	8
4.2	LKP-02 — Pemetaan Aktor dan Kewenangan	9
4.3	LKP-03 — Pengumpulan dan Penilaian Bukti	10
4.4	LKP-04 — Perumusan dan Analisis Alternatif	11
4.5	LKP-05 — Penyusunan Policy Brief dan Policy Memo	12
4.6	LKP-06 — Konsultasi Publik dan Deliberasi	13
4.7	LKP-07 — Implementasi, Risiko, dan Kesiapan	14
4.8	LKP-08 — Monitoring dan Evaluasi	15
4.9	LKP-09 — Kebijakan Digital, Smart Village, dan Data	16
4.10	LKP-10 — Policy Pitch, Diseminasi, dan Portofolio	17
BAB V	Penilaian, Rubrik, dan Ketercapaian CPL	19
BAB VI	Etika, Data, AI, Aksesibilitas, dan Keselamatan	21
BAB VII	Luaran, Repositori Bukti, dan PPEPP	23
LAMPIRAN	Lembar Kerja dan Formulir	25
PUSTAKA A	Daftar Pustaka, Acuan, dan Penutup	37

Nomor halaman daftar isi dikendalikan bersama versi dokumen. Setelah perubahan substansial, pengelola wajib memeriksa dan memperbaruinya sebelum penetapan.

BAB I — IDENTITAS, LANDASAN, DAN URGENSI

1.1 Identitas dan kedudukan modul

Buku Modul Laboratorium Kebijakan Publik merupakan pedoman akademik dan operasional untuk pembelajaran berbasis praktik kebijakan pada Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan. Modul menjadi penghubung antara kurikulum, RPS, capaian pembelajaran, sumber belajar, sarana-prasarana, dosen, mahasiswa, data, mitra, penilaian, dan repositori bukti.

Laboratorium dikembangkan sebagai laboratorium hybrid: ruang fisik untuk diskusi, simulasi, presentasi, dan klinik; serta ruang digital untuk pengelolaan data, kolaborasi, analisis, visualisasi, dan penyimpanan portofolio. Pemanfaatannya berkoordinasi dengan Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance serta Laboratorium Kepemimpinan Publik dan AI-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

Nama	Laboratorium Kebijakan Publik
Program studi	Sarjana Ilmu Pemerintahan
Fungsi	Pembelajaran; penelitian terapan; PkM; klinik kebijakan; simulasi; diseminasi; layanan mitra
Model	Hybrid policy laboratory: fisik, digital, data, lapangan, dan kemitraan
Pengguna	Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, peneliti, alumni, pemerintah/desa mitra, dan pemangku kepentingan sesuai izin
Produk	Problem statement, peta aktor, evidence matrix, matriks alternatif, policy brief/memo, risk register, desain M&E, digital policy canvas, dan portofolio

1.2 Landasan penyusunan

1. Visi, misi, tujuan, strategi, kurikulum OBE, RPS, peta jalan laboratorium, serta kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan ketentuan penggantinya yang berlaku.
4. Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2024 tentang standar untuk memperoleh status terakreditasi unggul bagi program studi dalam cakupan LAMSPAK.
5. Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSPAK yang berlaku, termasuk orientasi pada budaya mutu, relevansi, akuntabilitas, diferensiasi misi, pembelajaran, sumber pembelajaran laboratorium, bukti penggunaan, sarana-prasarana, luaran, dan PPEPP.
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta kebijakan keamanan informasi universitas.
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ketentuan akomodasi yang layak di pendidikan tinggi.
8. Peraturan kebijakan publik, pemerintahan daerah/desa, pelayanan publik, SPBE, dan Satu Data Indonesia yang relevan dengan kasus praktikum.

1.3 Urgensi

Masalah pemerintahan bersifat kompleks, lintas sektor, dipengaruhi kepentingan, ketidakpastian, keterbatasan sumber daya, transformasi digital, serta tuntutan keadilan dan akuntabilitas. Pembelajaran yang hanya berbasis

ceramah tidak cukup untuk membentuk kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Mahasiswa perlu berlatih melalui kasus nyata, data, simulasi, deliberasi, produksi dokumen kebijakan, dan umpan balik autentik.

Bagi Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, laboratorium juga berperan memperkuat diferensiasi misi melalui isu pemerintahan desa/daerah, Smart Village, digital governance, kewirausahaan digital, dan nilai AIK. Produk laboratorium dapat ditransformasikan menjadi portofolio mahasiswa, bahan penelitian, artikel ilmiah, rekomendasi PkM, serta masukan bagi pemerintah/desa mitra.

1.4 Prinsip pengelolaan

- Berbasis capaian: setiap kegiatan tertaut pada CPL, CPMK/Sub-CPMK, metode, asesmen, dan bukti.
- Berbasis bukti: klaim, skor, dan rekomendasi memiliki sumber, metode, keterbatasan, dan jejak analisis.
- Kontekstual: kasus berangkat dari kewenangan, kebutuhan, dan karakter desa/daerah serta perkembangan global.
- Etis dan berintegritas: amanah, adil, transparan, anti-plagiarisme, anti-fabrikasi, serta bebas konflik kepentingan yang tidak dikelola.
- Inklusif: menyediakan kesempatan partisipasi, akses informasi, dan akomodasi yang layak.
- Aman digital: menerapkan minimisasi data, hak akses, anonimisasi, retensi, backup, dan respons insiden.
- Kolaboratif: dosen, mahasiswa, pengelola, mitra, alumni, dan pengguna layanan memiliki peran yang jelas.
- Berkelanjutan: pelaksanaan dievaluasi dan ditingkatkan melalui PPEPP.

BAB II — TUJUAN, PROFIL LULUSAN, DAN CAPAIAN

2.1 Tujuan umum

Menyediakan pengalaman belajar autentik agar mahasiswa mampu menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan pemerintahan yang berbasis bukti, etis, inklusif, dapat dilaksanakan, adaptif terhadap transformasi digital, serta berorientasi pada kemaslahatan dan nilai publik.

2.2 Tujuan khusus modul

1. Mendiagnosis masalah kebijakan secara sistematis, multidisipliner, dan peka terhadap kelompok rentan.
2. Memetakan aktor, kepentingan, kewenangan, relasi, serta strategi pelibatan.
3. Mengumpulkan, menilai, mengolah, dan mengomunikasikan bukti secara sah dan aman.
4. Menyusun dan membandingkan alternatif kebijakan menggunakan kriteria yang transparan.
5. Menulis policy brief, policy memo, serta dokumen advokasi yang akurat dan berorientasi audiens.
6. Memfasilitasi konsultasi publik dan deliberasi yang inklusif.
7. Menganalisis implementasi, risiko, kesiapan, monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan hasil.
8. Mengembangkan desain kebijakan Smart Village dan digital governance yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
9. Membangun portofolio proses dan produk yang dapat diverifikasi untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan penjaminan mutu.

2.3 Profil lulusan yang didukung

Kode	Profil	Kontribusi laboratorium
PL-1	Analisis Kebijakan dan Pemerintahan	Menganalisis masalah, pilihan, implementasi, dan evaluasi kebijakan berbasis bukti.
PL-2	Aparatur/Manajer Pemerintahan	Mengelola program, layanan, keputusan, risiko, dan akuntabilitas sektor publik.
PL-3	Penggerak Inovasi dan Smart Village	Mendesain inovasi kebijakan, pelayanan, dan tata kelola desa/digital yang menciptakan nilai publik.
PL-4	Peneliti dan Fasilitator Pemerintahan	Menghasilkan pengetahuan terapan, memfasilitasi partisipasi, dan mengomunikasikan rekomendasi.

2.4 Capaian pembelajaran operasional modul

Kode berikut merupakan target operasional buku modul dan harus dipadankan dengan kode CPL resmi pada dokumen kurikulum/RPS yang berlaku tanpa mengubah substansi capaian.

Kode	Rumusan capaian
CPL-01	Menunjukkan sikap religius, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan etika pemerintahan berlandaskan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
CPL-02	Menguasai konsep, teori, aktor, institusi, proses, serta dinamika pemerintahan dan kebijakan publik pada tingkat desa, daerah, nasional, dan global.
CPL-03	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif serta mengambil keputusan berbasis data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kode	Rumusan capaian
CPL-04	Mampu mendiagnosis masalah pemerintahan dan kebijakan dengan pendekatan multidisipliner, kontekstual, inklusif, dan peka terhadap kelompok rentan.
CPL-05	Mampu menyusun, membandingkan, dan merekomendasikan alternatif kebijakan berdasarkan efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan, risiko, dan keberlanjutan.
CPL-06	Mampu menganalisis implementasi dan mengevaluasi hasil serta dampak kebijakan dengan metode yang sah.
CPL-07	Mampu memanfaatkan teknologi digital dan data pemerintahan secara aman, etis, transparan, dan bertanggung jawab.
CPL-08	Mampu berkomunikasi, berkolaborasi, memfasilitasi deliberasi, dan mengadvokasi rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan.

2.5 Matriks tujuan–CPL–profil

Tujuan	CPL	Profil	Bukti langsung
TM-1 Diagnosis	CPL-02, 03, 04	PL-1, PL-4	Problem statement, issue tree, evidence matrix
TM-2 Alternatif	CPL-03, 05	PL-1, PL-2, PL-3	Matriks keputusan, analisis distribusi, rekomendasi
TM-3 Implementasi/evaluasi	CPL-03, 06, 07	PL-1, PL-2	RACI, risk register, ToC, matriks indikator
TM-4 Komunikasi/deliberasi	CPL-01, 04, 08	PL-2, PL-4	Konsultasi, tanggapan, policy brief, pitch
TM-5 Smart Village/digital	CPL-01, 05, 07	PL-2, PL-3	Digital policy canvas, data map, prototype

BAB III — DESAIN PEMBELAJARAN LABORATORIUM

3.1 Pendekatan pembelajaran

Pendekatan	Penerapan	Bukti
Case-based learning	Kasus aktual desa/daerah dianalisis dengan teori, regulasi, data, dan perspektif aktor.	Case pack, lembar analisis, refleksi
Project-based learning	Kelompok menghasilkan produk kebijakan melalui beberapa iterasi dan review.	Logbook, versi produk, rubrik
Simulation/role play	Mahasiswa memainkan peran aktor dalam agenda, konsultasi, negosiasi, atau sidang kebijakan.	Skenario, notula, rekaman, observasi
Policy clinic	Dosen, alumni, praktisi, atau mitra memberi umpan balik pada produk mahasiswa.	Daftar hadir, catatan klinik, revisi
Service learning/PkM	Analisis diarahkan pada kebutuhan mitra dan hasil dikembalikan dalam format yang dapat digunakan.	IA/surat tugas, validasi, bukti pemanfaatan
Reflective learning	Mahasiswa menilai asumsi, bias, etika, AIK, kontribusi, dan perbaikan diri.	Jurnal refleksi

3.2 Alur kerja baku

1. Dosen memetakan kegiatan terhadap RPS, CPL/CPMK/Sub-CPMK, rubrik, mata kuliah, jadwal, kebutuhan fasilitas/data, risiko, dan luaran.
2. Pengelola laboratorium memverifikasi jadwal, kapasitas, aksesibilitas, peralatan/perangkat lunak, legalitas data, mitra, dan kebutuhan dukungan.
3. Mahasiswa mengikuti orientasi tata tertib, keselamatan, etika, perlindungan data, integritas akademik, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.
4. Kegiatan dilaksanakan menggunakan modul, lembar kerja, logbook, check-in formatif, dan review sejawat/dosen/mitra.
5. Produk dinilai dengan rubrik; skor, umpan balik, dan ketercapaian capaian direkap.
6. Artefak, dokumentasi, rubrik, rekap, refleksi, validasi mitra, serta tindak lanjut disimpan dalam repositori dengan metadata.
7. Hasil semester dibahas dalam evaluasi/RTM untuk pengendalian dan peningkatan modul, fasilitas, metode, kasus, serta kemitraan.

3.3 Peta 16 pertemuan

Pertemuan	Kegiatan	Luaran/bukti
1	Orientasi laboratorium, pre-test, kontrak belajar, etika, data, AI, dan aksesibilitas	Pre-test; pernyataan integritas; kebutuhan akomodasi
2	Case briefing dan penetapan isu	Case selection note
3	LKP-01 Diagnosis masalah	Problem statement dan issue tree
4	LKP-02 Aktor dan kewenangan	Peta aktor dan strategi pelibatan
5	LKP-03 Bukti kebijakan	Evidence matrix dan visualisasi

Pertemuan	Kegiatan	Luaran/bukti
6–7	LKP-04 Alternatif kebijakan	Matriks keputusan dan rekomendasi awal
8	Review tengah/klinik kebijakan	Umpan balik dan log revisi
9–10	LKP-05 Policy brief dan memo	Draf, fact-check, dan produk final
11	LKP-06 Konsultasi publik	Notula dan matriks tanggapan
12	LKP-07 Implementasi dan risiko	RACI, process map, risk register
13	LKP-08 Monitoring dan evaluasi	ToC, indikator, desain evaluasi
14	LKP-09 Kebijakan digital/Smart Village	Digital policy canvas dan risk assessment
15	LKP-10 Policy pitch/policy expo	Pitch, rubrik panel, dokumentasi
16	Post-test, portofolio, refleksi, evaluasi pengguna, dan RTL	Portofolio final; rekap CPMK/CPL; survei; RTL

3.4 Integrasi mata kuliah

Kode	Mata kuliah	Integrasi dengan Laboratorium Kebijakan Publik
IP001	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	Pengenalan aktor, kewenangan, masalah pemerintahan, dan konteks kebijakan.
IP005	Pemerintahan Desa	Analisis kebijakan desa, partisipasi, kelembagaan, dan pembangunan lokal.
IP009	Kebijakan Sektor Publik	Mata kuliah jangkar: analisis, formulasi, implementasi, evaluasi, dan komunikasi kebijakan.
IP011	Pelayanan Publik	Diagnosis masalah layanan, standar layanan, pengalaman pengguna, dan rekomendasi perbaikan.
IP013	Pemerintahan Digital	Pemanfaatan data, platform digital, interoperabilitas, risiko, dan etika kebijakan digital.
IP014	Smart Village dan Tata Kelola Desa	Desain pilihan kebijakan Smart Village yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan.
IP015	Digital Governance dan Pelayanan Publik	Analisis kebijakan layanan digital dan tata kelola data pemerintah.
IP016	Metode Penelitian Sosial	Perumusan masalah, pengumpulan bukti, analisis data, validitas, dan etika penelitian.
IP031	Etika Pemerintahan	Uji integritas, keadilan, kepentingan publik, konflik kepentingan, dan nilai AIK.
IP042	Kewirausahaan	Policy entrepreneurship, inovasi sosial, penciptaan nilai publik, dan strategi adopsi.
IP061	Penulisan Artikel Ilmiah	Transformasi analisis laboratorium menjadi artikel atau naskah diseminasi ilmiah.
IP062	Skripsi	Dukungan analisis data, validasi instrumen, visualisasi, dan rekomendasi kebijakan tugas akhir.

3.5 Peran

Pihak	Tanggung jawab utama
Ketua Program Studi	Menetapkan arah, integrasi kurikulum, sumber daya, target mutu, tindak lanjut, dan pengendalian dokumen.
Kepala Laboratorium	Mengelola jadwal, sarana, data, risiko, pengguna, mitra, bukti, evaluasi, dan laporan semester.
Dosen pengampu	Memetakan CPL/CPMK, menyiapkan kasus dan rubrik, membimbing, menilai, memberi umpan balik, serta menyerahkan bukti.
Pranata/tenaga kependidikan	Menyiapkan ruang/perangkat/akun, presensi, log, inventaris, dukungan akses, dan repositori.
Mahasiswa	Mematuhi tata tertib, menjaga data/fasilitas, bekerja berintegritas, mendokumentasikan proses, dan menindaklanjuti umpan balik.
Mitra/panel	Memberi kasus/masukan/data sesuai kewenangan, memvalidasi relevansi, menilai pemanfaatan, dan menjaga kesepakatan etik/kerahasiaan.
Unit Penjaminan Mutu	Menelaah kesesuaian, bukti pelaksanaan, hasil, risiko, survei, tindak lanjut, dan efektivitas peningkatan.

BAB IV — UNIT PRAKTIKUM LABORATORIUM KEBIJAKAN PUBLIK

Sepuluh unit berikut dapat digunakan sebagai rangkaian terpadu atau dipilih sesuai CPMK dan RPS. Dosen wajib menyesuaikan tingkat kedalaman, data, keluaran, dan bobot asesmen tanpa menghilangkan unsur etika, keterlacakan bukti, serta refleksi.

ATURAN KASUS Gunakan kasus dan data resmi terbaru yang dapat diverifikasi. Nama individu, data pribadi, atau informasi sensitif dianonimkan kecuali terdapat dasar yang sah dan persetujuan. Kasus fiktif harus diberi label jelas sebagai simulasi.

4.1 LKP-01 — Diagnosis Masalah Kebijakan dan Penyusunan Problem Statement

Kode/durasi	LKP-01 2 × 170 menit
Mata kuliah	IP001, IP009, IP016
CPL utama	CPL-02, CPL-03, CPL-04
Kasus/input	Masalah layanan dasar, ketahanan pangan, kemiskinan, stunting, sampah, atau isu pemerintahan desa/daerah yang dipilih dari data resmi terbaru.
Luaran	Problem statement, issue tree, batas masalah, dan daftar kebutuhan bukti.

Tujuan pembelajaran

- Membedakan gejala, masalah inti, penyebab, dan dampak.
- Merumuskan masalah secara netral, terukur, dan berorientasi publik.
- Menentukan unit analisis, kelompok terdampak, wilayah, dan horizon waktu.

Ringkasan konsep

Diagnosis kebijakan menghindari solusi prematur. Mahasiswa menguji apakah masalah benar-benar publik, memiliki dasar kewenangan pemerintah, berdampak signifikan, serta dapat dibuktikan melalui triangulasi data dan perspektif pemangku kepentingan.

Prosedur praktikum

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1	Baca data awal, regulasi, berita resmi, dan catatan mitra; tulis fakta yang telah diketahui dan yang masih perlu diverifikasi.	Daftar fakta/pertanyaan
2	Kelompokkan gejala, penyebab langsung, penyebab struktural, dan dampak; hindari pernyataan yang menyalahkan kelompok tertentu.	Peta gejala
3	Bangun pohon masalah; uji hubungan sebab-akibat dengan bukti minimal dua jenis sumber.	Issue tree tervalidasi
4	Tetapkan populasi/kelompok, wilayah, periode, kewenangan, dan batas data.	Scope note
5	Susun problem statement 100–150 kata dengan indikator baseline dan urgensi.	Problem statement
6	Gunakan checklist kejelasan, netralitas, bukti, inklusi, dan keterhubungan dengan kewenangan.	Catatan perbaikan

Urutan tahap: 1 Orientasi kasus; 2 Pemetaan gejala; 3 Issue tree; 4 Batas masalah; 5 Rumusan final; 6 Review sejawat.

Asesmen dan bukti

Kriteria khusus	Ketepatan diagnosis 35%; kualitas bukti 25%; kejelasan batas masalah 20%; sensitivitas etika/inklusi 10%; keterlacakan revisi 10%.
Bukti minimum	Lembar kerja; sumber/data; logbook; produk; rubrik; umpan balik; versi revisi; daftar hadir/dokumentasi; metadata repositori.
Refleksi	Apa asumsi awal yang berubah setelah membaca data? Siapa yang berpotensi tidak terlihat dalam definisi masalah?

TITIK KENDALI Produk tidak dinyatakan selesai sebelum sumber dan keterbatasan dicantumkan, penggunaan AI diungkapkan, data sensitif diamankan, serta revisi berdasarkan umpan balik terdokumentasi.

4.2 LKP-02 — Pemetaan Aktor, Kepentingan, dan Kewenangan

Kode/durasi	LKP-02 2 × 170 menit
Mata kuliah	IP001, IP005, IP009, IP031
CPL utama	CPL-01, CPL-02, CPL-04, CPL-08
Kasus/input	Aktor pemerintah, DPRD/BPD, swasta, organisasi masyarakat, media, akademisi, kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam isu terpilih.
Luaran	Matriks aktor, peta power–interest, analisis kewenangan, dan strategi pelibatan.

Tujuan pembelajaran

- Mengidentifikasi aktor formal dan informal beserta dasar kewenangannya.
- Menganalisis kepentingan, sumber daya, pengaruh, posisi, dan potensi konflik.
- Menyusun strategi pelibatan yang transparan, setara, dan tidak manipulatif.

Ringkasan konsep

Kebijakan merupakan proses relasional. Pemetaan aktor harus membedakan kewenangan legal, pengaruh faktual, kepentingan, legitimasi, dan tingkat keterdampakan agar strategi partisipasi tidak hanya berpusat pada aktor kuat.

Prosedur praktikum

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1	Gunakan pendekatan pentahelix dan analisis kelompok terdampak untuk membuat daftar awal.	Longlist aktor
2	Telusuri regulasi/mandat, peran formal, serta hubungan antarunit pemerintahan.	Matriks kewenangan
3	Beri skor pengaruh, kepentingan, legitimasi, keterdampakan, dan sikap terhadap isu dengan alasan berbukti.	Matriks skoring
4	Visualisasikan power–interest dan hubungan dukungan, resistensi, ketergantungan, atau konflik.	Peta aktor
5	Tetapkan metode informasi, konsultasi, kolaborasi, atau pemberdayaan untuk tiap kelompok.	Rencana pelibatan
6	Periksa representasi kelompok rentan dan risiko tokenisme, dominasi, konflik kepentingan, serta keamanan partisipan.	Checklist inklusi

Urutan tahap: 1 Daftar aktor; 2 Validasi kewenangan; 3 Skoring; 4 Peta relasi; 5 Strategi; 6 Uji inklusi.

Asesmen dan bukti

Kriteria khusus	Kelengkapan aktor 20%; ketepatan kewenangan 25%; argumentasi skoring 20%; strategi pelibatan 20%; etika dan inklusi 15%.
Bukti minimum	Lembar kerja; sumber/data; logbook; produk; rubrik; umpan balik; versi revisi; daftar hadir/dokumentasi; metadata repositori.
Refleksi	Aktor mana yang paling terdampak tetapi paling lemah pengaruhnya? Bagaimana memastikan musyawarah yang berkeadilan?
TITIK KENDALI Produk tidak dinyatakan selesai sebelum sumber dan keterbatasan dicantumkan, penggunaan AI diungkapkan, data sensitif diamankan, serta revisi berdasarkan umpan balik terdokumentasi.	

4.3 LKP-03 — Pengumpulan dan Penilaian Bukti Kebijakan

Kode/durasi	LKP-03 2 × 170 menit
Mata kuliah	IP009, IP013, IP015, IP016
CPL utama	CPL-03, CPL-04, CPL-07
Kasus/input	Dataset terbuka pemerintah, dokumen perencanaan, statistik, regulasi, survei, wawancara, hasil penelitian, dan umpan balik pengguna layanan.
Luaran	Evidence matrix, catatan kualitas data, visualisasi dasar, dan daftar kesenjangan bukti.

Tujuan pembelajaran

- Mencari dan memilih bukti yang relevan serta sah.
- Menilai mutu, keterkinian, bias, keterbandingan, dan keterbatasan data.
- Menyajikan bukti secara jujur, aman, dan mudah dipahami.

Ringkasan konsep

Evidence-based policy tidak berarti satu angka menentukan keputusan. Bukti harus dinilai menurut relevansi, kredibilitas, metode, konteks, keterkinian, serta konsekuensi etik. Ketidakpastian dan keterbatasan wajib dinyatakan.

Prosedur praktikum

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1	Turunkan problem statement menjadi pertanyaan yang dapat dijawab oleh data.	Daftar pertanyaan
2	Catat pemilik, tahun, metode, unit, lisensi/izin, tingkat akses, dan tautan sumber.	Katalog sumber
3	Nilai relevansi, validitas, reliabilitas, kelengkapan, keterkinian, bias, dan keterbandingan.	Evidence matrix
4	Bersihkan data seperlunya, simpan data mentah terpisah, dokumentasikan setiap transformasi.	Log pengolahan
5	Buat tabel/grafik sederhana yang tidak menyesatkan dan mencantumkan sumber serta batas interpretasi.	Visual bukti

Tahap	Aktivitas	Keluaran
6	Bandungkan sekurang-kurangnya dua sumber/metode dan identifikasi kesenjangan data.	Catatan triangulasi

Urutan tahap: 1 Pertanyaan bukti; 2 Inventaris sumber; 3 Penilaian mutu; 4 Pengolahan; 5 Visualisasi; 6 Triangulasi.

Asesmen dan bukti

Kriteria khusus	Relevansi sumber 20%; penilaian kualitas 25%; keterlacakan proses 20%; interpretasi/visualisasi 20%; keamanan dan etika data 15%.
Bukti minimum	Lembar kerja; sumber/data; logbook; produk; rubrik; umpan balik; versi revisi; daftar hadir/dokumentasi; metadata repositori.
Refleksi	Bukti apa yang paling kuat dan paling lemah? Bagaimana ketidakpastian dapat mengubah rekomendasi?

TITIK KENDALI Produk tidak dinyatakan selesai sebelum sumber dan keterbatasan dicantumkan, penggunaan AI diungkapkan, data sensitif diamankan, serta revisi berdasarkan umpan balik terdokumentasi.

4.4 LKP-04 — Perumusan dan Analisis Alternatif Kebijakan

Kode/durasi	LKP-04 3 × 170 menit
Mata kuliah	IP009, IP011, IP014, IP042
CPL utama	CPL-03, CPL-04, CPL-05
Kasus/input	Pilihan kebijakan untuk perbaikan layanan, Smart Village, perlindungan sosial, ekonomi lokal, atau tata kelola lingkungan.
Luaran	Matriks alternatif, kriteria berbobot, analisis konsekuensi, dan opsi terpilih.

Tujuan pembelajaran

- Menghasilkan sedikitnya tiga alternatif yang benar-benar berbeda, termasuk status quo.
- Menyusun kriteria dan bobot secara transparan.
- Menganalisis trade-off, distribusi manfaat-beban, risiko, serta kelayakan implementasi.

Ringkasan konsep

Alternatif kebijakan harus dibandingkan menggunakan kriteria yang sesuai dengan tujuan dan nilai publik. Skor membantu struktur keputusan, tetapi tidak menggantikan argumentasi, analisis distribusi, dan pertimbangan etis.

Prosedur praktikum

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1	Nyatakan tujuan kebijakan, kendala, populasi sasaran, dan kondisi minimum.	Kerangka keputusan
2	Susun status quo dan minimal tiga opsi instrumen regulatif, ekonomi, informasi, organisasi, atau digital.	Daftar alternatif
3	Pilih efektivitas, efisiensi, keadilan, legalitas, kelayakan politik/administratif/teknis, risiko, dan keberlanjutan.	Daftar kriteria/bobot
4	Beri skor berbukti; dokumentasikan asumsi dan sumber; lakukan uji sensitivitas sederhana.	Matriks keputusan

Tahap	Aktivitas	Keluaran
5	Identifikasi siapa menerima manfaat, biaya, risiko, dan potensi dampak tak diinginkan.	Distributional note
6	Pilih opsi atau paket opsi; jelaskan syarat, mitigasi, dan alasan tidak memilih opsi lain.	Rekomendasi awal

Urutan tahap: 1 Tujuan dan batas; 2 Generasi opsi; 3 Kriteria; 4 Skoring; 5 Analisis distribusi; 6 Rekomendasi.

Asesmen dan bukti

Kriteria khusus	Diferensiasi opsi 15%; kualitas kriteria/bobot 20%; bukti skoring 25%; trade-off dan distribusi 20%; kelayakan/mitigasi 20%.
Bukti minimum	Lembar kerja; sumber/data; logbook; produk; rubrik; umpan balik; versi revisi; daftar hadir/dokumentasi; metadata repositori.
Refleksi	Kriteria mana paling menentukan hasil? Apakah perubahan bobot mengubah pilihan? Siapa menanggung beban terbesar?

TITIK KENDALI Produk tidak dinyatakan selesai sebelum sumber dan keterbatasan dicantumkan, penggunaan AI diungkapkan, data sensitif diamankan, serta revisi berdasarkan umpan balik terdokumentasi.

4.5 LKP-05 — Penyusunan Policy Brief dan Policy Memo

Kode/durasi	LKP-05 3 × 170 menit
Mata kuliah	IP009, IP011, IP061, IP062
CPL utama	CPL-03, CPL-05, CPL-08
Kasus/input	Hasil diagnosis, bukti, dan analisis alternatif dari LKP-01 sampai LKP-04.
Luaran	Policy brief 4–6 halaman dan executive memo 1 halaman.

Tujuan pembelajaran

- Menulis ringkas untuk pembuat keputusan tanpa kehilangan akurasi.
- Menghubungkan masalah, bukti, alternatif, dan rekomendasi secara konsisten.
- Menyajikan rekomendasi yang spesifik, dapat dilaksanakan, dan terukur.

Ringkasan konsep

Policy brief adalah dokumen advokasi berbasis bukti; policy memo mendukung keputusan internal. Keduanya menuntut audiens yang jelas, argumen logis, visual efektif, sitasi, pengungkapan keterbatasan, dan ajakan tindakan yang realistis.

Prosedur praktikum

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1	Tetapkan pengambil keputusan, kewenangan, kebutuhan informasi, dan keputusan yang diminta.	Audience note
2	Susun judul, ringkasan eksekutif, masalah, bukti, opsi, rekomendasi, implementasi, risiko, dan referensi.	Outline
3	Tulis dengan bahasa aktif, paragraf pendek, istilah konsisten, data bersumber, dan visual yang relevan.	Draf 1

Tahap	Aktivitas	Keluaran
4	Periksa angka, kutipan, regulasi, konflik kepentingan, penggunaan AI, dan konsistensi klaim–sumber.	Checklist verifikasi
5	Lakukan review sejawat dan dosen menggunakan rubrik; catat revisi yang diterima/ditolak beserta alasan.	Log revisi
6	Buat policy brief 4–6 halaman, memo 1 halaman, versi aksesibel, dan metadata repositori.	Produk final

Urutan tahap: 1 Audiens; 2 Kerangka; 3 Draf; 4 Fact-check; 5 Review; 6 Finalisasi.

Asesmen dan bukti

Kriteria khusus	Ketajaman masalah 15%; bukti/analisis 25%; kualitas rekomendasi 25%; orientasi audiens/komunikasi 20%; sitasi, aksesibilitas, dan integritas 15%.
Bukti minimum	Lembar kerja; sumber/data; logbook; produk; rubrik; umpan balik; versi revisi; daftar hadir/dokumentasi; metadata repositori.
Refleksi	Apa keputusan konkret yang diminta? Bagian mana yang paling mungkin diperdebatkan oleh audiens dan mengapa?
TITIK KENDALI Produk tidak dinyatakan selesai sebelum sumber dan keterbatasan dicantumkan, penggunaan AI diungkapkan, data sensitif diamankan, serta revisi berdasarkan umpan balik terdokumentasi.	

4.6 LKP-06 — Simulasi Konsultasi Publik dan Deliberasi Kebijakan

Kode/durasi	LKP-06 3 × 170 menit
Mata kuliah	IP005, IP009, IP031, IP042
CPL utama	CPL-01, CPL-04, CPL-08
Kasus/input	Konsultasi rancangan program desa/daerah atau kebijakan layanan dengan pembagian peran pemangku kepentingan.
Luaran	Desain forum, bahan konsultasi, notula, matriks tanggapan, dan revisi rekomendasi.

Tujuan pembelajaran

- Merancang konsultasi yang informatif, inklusif, aman, dan dapat ditelusuri.
- Memfasilitasi perbedaan kepentingan secara adil.
- Mengubah masukan publik menjadi tanggapan dan revisi yang transparan.

Ringkasan konsep

Partisipasi yang bermakna mensyaratkan informasi yang cukup, akses yang setara, ruang aman, dokumentasi tanggapan, dan penjelasan bagaimana masukan digunakan. Deliberasi bukan sekadar daftar hadir.

Prosedur praktikum

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1	Tetapkan tujuan, peserta, metode, aksesibilitas, aturan main, risiko, dan mekanisme pengaduan.	Rencana forum
2	Bagi peran aktor, siapkan position note dan bahan kebijakan yang seimbang.	Paket peserta

Tahap	Aktivitas	Keluaran
3	Jelaskan tujuan, informasi dasar, etika, kerahasiaan, dan aturan penggunaan bukti.	Berita acara briefing
4	Fasilitator mengelola presentasi, pertanyaan, konflik, waktu bicara, dan partisipasi kelompok rentan.	Rekaman/notula
5	Klasifikasikan masukan: diterima, diterima sebagian, ditolak, atau perlu data; berikan alasan.	Matriks tanggapan
6	Perbarui rekomendasi dan tulis refleksi proses, bias, dominasi, serta pembelajaran AIK.	Rekomendasi revisi

Urutan tahap: 1 Desain; 2 Persiapan peran; 3 Briefing; 4 Simulasi; 5 Tanggapan; 6 Revisi.

Asesmen dan bukti

Kriteria khusus	Desain inklusif 20%; penguasaan substansi 20%; fasilitasi/deliberasi 25%; matriks tanggapan 20%; etika/refleksi 15%.
Bukti minimum	Lembar kerja; sumber/data; logbook; produk; rubrik; umpan balik; versi revisi; daftar hadir/dokumentasi; metadata repositori.
Refleksi	Apakah semua peserta memiliki peluang setara untuk memengaruhi hasil? Bagaimana keputusan atas masukan dijelaskan?
TITIK KENDALI Produk tidak dinyatakan selesai sebelum sumber dan keterbatasan dicantumkan, penggunaan AI diungkapkan, data sensitif diamankan, serta revisi berdasarkan umpan balik terdokumentasi.	

4.7 LKP-07 — Analisis Implementasi, Risiko, dan Kesiapan Kebijakan

Kode/durasi	LKP-07 2 × 170 menit
Mata kuliah	IP005, IP009, IP011, IP013
CPL utama	CPL-03, CPL-05, CPL-06, CPL-07
Kasus/input	Rencana implementasi kebijakan/layanan pada organisasi perangkat daerah atau pemerintah desa.
Luaran	Peta implementasi, RACI, risk register, rencana mitigasi, dan indikator kesiapan.

Tujuan pembelajaran

- Menerjemahkan rekomendasi menjadi tahapan, peran, sumber daya, dan indikator.
- Mengidentifikasi risiko hukum, politik, administratif, fiskal, teknis, sosial, etika, dan data.
- Menyusun mitigasi, pemilik risiko, dan sinyal peringatan dini.

Ringkasan konsep

Kebijakan yang baik dapat gagal karena desain implementasi yang lemah. Analisis kesiapan memeriksa mandat, kapasitas, koordinasi, anggaran, teknologi, perilaku pelaksana, penerimaan publik, dan mekanisme akuntabilitas.

Prosedur praktikum

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1	Uraikan bagaimana input dan aktivitas menghasilkan keluaran, hasil, serta dampak.	Rantai hasil

Tahap	Aktivitas	Keluaran
2	Susun tahapan implementasi, keputusan kunci, dependensi, dan titik layanan.	Process map
3	Tetapkan responsible, accountable, consulted, dan informed untuk setiap tahapan.	Matriks RACI
4	Catat penyebab, peristiwa, dampak, probabilitas, severity, dan kontrol yang sudah ada.	Risk register
5	Tetapkan perlakuan risiko, pemilik, tenggat, sumber daya, dan indikator peringatan dini.	Rencana mitigasi
6	Nilai aspek legal, SDM, fiskal, data/teknologi, komunikasi, dan koordinasi; berikan keputusan go/revise/pilot.	Readiness note

Urutan tahap: 1 Theory of action; 2 Peta proses; 3 RACI; 4 Identifikasi risiko; 5 Mitigasi; 6 Uji kesiapan.

Asesmen dan bukti

Kriteria khusus	Koherensi implementasi 20%; kejelasan peran 15%; kelengkapan risiko 25%; kualitas mitigasi 25%; keputusan kesiapan 15%.
Bukti minimum	Lembar kerja; sumber/data; logbook; produk; rubrik; umpan balik; versi revisi; daftar hadir/dokumentasi; metadata repositori.
Refleksi	Risiko mana yang dapat menggagalkan kebijakan? Apakah mitigasi memindahkan beban kepada kelompok rentan?
TITIK KENDALI Produk tidak dinyatakan selesai sebelum sumber dan keterbatasan dicantumkan, penggunaan AI diungkapkan, data sensitif diamankan, serta revisi berdasarkan umpan balik terdokumentasi.	

4.8 LKP-08 — Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Kode/durasi	LKP-08 3 × 170 menit
Mata kuliah	IP009, IP011, IP016, IP062
CPL utama	CPL-03, CPL-06, CPL-07
Kasus/input	Program pelayanan, Smart Village, pemberdayaan ekonomi, atau kebijakan desa/daerah yang memiliki dokumen dan data pemantauan.
Luaran	Theory of change, matriks indikator, desain evaluasi, instrumen, dan rencana pemanfaatan hasil.

Tujuan pembelajaran

- Membedakan input, proses, output, outcome, dan impact.
- Menyusun indikator SMART beserta definisi operasional dan sumber data.
- Memilih desain evaluasi yang proporsional serta merencanakan pemanfaatan hasil.

Ringkasan konsep

Monitoring menjawab apakah pelaksanaan berjalan; evaluasi menilai nilai, hasil, dan sebab. Desain harus sesuai pertanyaan, ketersediaan data, kapasitas, risiko etik, serta tingkat atribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur praktikum

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1	Rumuskan pertanyaan relevansi, efektivitas, efisiensi, koherensi, dampak, keadilan, dan keberlanjutan.	Daftar pertanyaan
2	Susun asumsi, input, aktivitas, output, outcome, impact, dan faktor eksternal.	Diagram ToC
3	Tetapkan definisi, rumus, baseline, target, disaggregasi, sumber, frekuensi, dan penanggung jawab.	Matriks indikator
4	Pilih studi dokumen, survei, wawancara, observasi, before–after, pembandingan, atau mixed methods sesuai kelayakan.	Desain evaluasi
5	Susun instrumen, protokol data, sampling, persetujuan, anonimisasi, dan uji coba.	Paket instrumen
6	Tentukan audiens, keputusan, jadwal pelaporan, diseminasi, dan tindak lanjut rekomendasi.	Utilization plan

Urutan tahap: 1 Pertanyaan evaluasi; 2 Theory of change; 3 Indikator; 4 Desain; 5 Instrumen; 6 Pemanfaatan.

Asesmen dan bukti

Kriteria khusus	Pertanyaan/ToC 20%; kualitas indikator 25%; kesesuaian desain 20%; mutu instrumen/etika 20%; rencana pemanfaatan 15%.
Bukti minimum	Lembar kerja; sumber/data; logbook; produk; rubrik; umpan balik; versi revisi; daftar hadir/dokumentasi; metadata repositori.
Refleksi	Apa yang dapat dan tidak dapat diatribusikan kepada kebijakan? Bagaimana data dipilah agar ketimpangan tidak tersembunyi?
TITIK KENDALI Produk tidak dinyatakan selesai sebelum sumber dan keterbatasan dicantumkan, penggunaan AI diungkapkan, data sensitif diamankan, serta revisi berdasarkan umpan balik terdokumentasi.	

4.9 LKP-09 — Kebijakan Digital, Smart Village, dan Tata Kelola Data

Kode/durasi	LKP-09 3 × 170 menit
Mata kuliah	IP013, IP014, IP015, IP031
CPL utama	CPL-01, CPL-05, CPL-07
Kasus/input	Layanan administrasi desa, kanal pengaduan, dashboard pembangunan, sistem informasi, atau layanan publik digital.
Luaran	Digital policy canvas, peta proses/data, asesmen risiko digital, dan purwarupa kebijakan/layanan.

Tujuan pembelajaran

- Menganalisis masalah publik sebelum memilih solusi teknologi.
- Mendesain tata kelola data, hak akses, interoperabilitas, dan akuntabilitas.
- Menguji aksesibilitas, keamanan, privasi, bias, dan keberlanjutan solusi digital.

Ringkasan konsep

Transformasi digital bukan sekadar aplikasi. Kebijakan digital harus memiliki tujuan publik, proses yang disederhanakan, data yang sah, opsi non-digital, keamanan, perlindungan data, aksesibilitas, kapasitas organisasi, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Prosedur praktikum

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1	Petakan pengalaman warga, pain points, variasi akses, dan opsi layanan non-digital.	Journey map
2	Hilangkan langkah yang tidak bernilai; tetapkan kewenangan, standar waktu, dan titik kontrol.	To-be process
3	Catat data minimal, sumber, dasar pemrosesan, kualitas, pertukaran, retensi, dan hak akses.	Data map
4	Uji privasi, keamanan, bias, eksklusi digital, vendor lock-in, downtime, dan penyalahgunaan.	Risk assessment
5	Buat alur/purwarupa sederhana dan uji dengan skenario pengguna beragam.	Prototype/test log
6	Ringkas tujuan, pengguna, mandat, proses, data, sumber daya, indikator, risiko, dan tata kelola.	Digital policy canvas

Urutan tahap: 1 User/problem journey; 2 Process redesign; 3 Data map; 4 Risk assessment; 5 Purwarupa; 6 Policy canvas.

Asesmen dan bukti

Kriteria khusus	Orientasi masalah/pengguna 20%; desain proses/data 25%; risiko/etika 25%; inklusi dan alternatif akses 15%; kelayakan purwarupa 15%.
Bukti minimum	Lembar kerja; sumber/data; logbook; produk; rubrik; umpan balik; versi revisi; daftar hadir/dokumentasi; metadata repositori.
Refleksi	Siapa yang berpotensi tertinggal oleh digitalisasi? Data apa yang tidak perlu dikumpulkan?
TITIK KENDALI Produk tidak dinyatakan selesai sebelum sumber dan keterbatasan dicantumkan, penggunaan AI diungkapkan, data sensitif diamankan, serta revisi berdasarkan umpan balik terdokumentasi.	

4.10 LKP-10 — Policy Pitch, Diseminasi, dan Portofolio Bukti

Kode/durasi	LKP-10 2 × 170 menit
Mata kuliah	IP009, IP042, IP061, IP062
CPL utama	CPL-01, CPL-03, CPL-08
Kasus/input	Produk akhir rangkaian praktikum yang dipresentasikan kepada panel dosen, mahasiswa, alumni, pemerintah/desa mitra, atau pemangku kepentingan relevan.
Luaran	Pitch 7 menit, deck aksesibel, executive memo, portofolio bukti, dan rencana tindak lanjut mitra.

Tujuan pembelajaran

- Menyampaikan rekomendasi secara akurat, persuasif, dan sesuai kewenangan audiens.

- Menjawab kritik dengan bukti dan mengakui keterbatasan.
- Menyusun portofolio yang lengkap, tertelusur, dan siap diaudit.

Ringkasan konsep

Diseminasi adalah bagian dari siklus kebijakan. Komunikasi yang baik menggabungkan cerita masalah, bukti, pilihan, rekomendasi, implementasi, risiko, dan keputusan yang diminta. Portofolio membuktikan proses, bukan hanya produk akhir.

Prosedur praktikum

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1	Pilih artefak dari LKP-01–LKP-09 dan susun indeks metadata, versi, pemilik, tanggal, dan lokasi repositori.	Indeks bukti
2	Tulis satu masalah, tiga bukti kunci, rekomendasi, manfaat publik, risiko, dan keputusan yang diminta.	Message map
3	Buat maksimal 8 slide dengan sumber, alt-text/uraian visual, kontras cukup, dan versi dokumen aksesibel.	Deck final
4	Sampaikan 7 menit dan jawab 8 menit; panel menilai dengan rubrik dan memberi catatan.	Rekaman/rubrik
5	Perbaiki produk berdasarkan kritik; buat matriks tanggapan dan alasan perubahan.	Produk revisi
6	Unggah portofolio, tetapkan hak akses, dokumentasikan diseminasi, dan usulkan tindak lanjut/pemanfaatan.	Portofolio lengkap

Urutan tahap: 1 Kurasi bukti; 2 Pesan utama; 3 Deck; 4 Simulasi pitch; 5 Revisi; 6 Serah terima.

Asesmen dan bukti

Kriteria khusus	Kejelasan keputusan 20%; kekuatan bukti 25%; kelayakan rekomendasi 20%; komunikasi/tanya jawab 20%; kelengkapan bukti/integritas 15%.
Bukti minimum	Lembar kerja; sumber/data; logbook; produk; rubrik; umpan balik; versi revisi; daftar hadir/dokumentasi; metadata repositori.
Refleksi	Kritik mana yang mengubah rekomendasi? Apa bukti pemanfaatan yang harus dipantau setelah diseminasi?

TITIK KENDALI Produk tidak dinyatakan selesai sebelum sumber dan keterbatasan dicantumkan, penggunaan AI diungkapkan, data sensitif diamankan, serta revisi berdasarkan umpan balik terdokumentasi.

BAB V — PENILAIAN, RUBRIK, DAN KETERCAPAIAN CPL

5.1 Prinsip penilaian

- Edukatif: asesmen memberi umpan balik yang dapat ditindaklanjuti.
- Autentik: produk dan proses mencerminkan tugas analisis/pengelola kebijakan.
- Objektif: kriteria, bobot, dan tingkat kinerja dijelaskan sebelum kegiatan.
- Akuntabel: sumber skor, rubrik, penilai, revisi, dan rekap dapat ditelusuri.
- Inklusif: bentuk asesmen/akses dapat disesuaikan tanpa menurunkan capaian esensial.
- Berintegritas: fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, manipulasi visual, dan penggunaan AI tanpa pengungkapan ditangani sesuai kebijakan akademik.

5.2 Komposisi nilai yang direkomendasikan

Komponen	Bobot	Bukti
Orientasi, pre-test, kesiapan, dan logbook	10%	Pre-test, kontrak integritas, logbook, checklist
Lembar kerja dan produk antara LKP-01–LKP-04	25%	Issue tree, actor map, evidence matrix, alternatives matrix
Policy brief/policy memo LKP-05	25%	Produk, fact-check, rubrik, log revisi
Simulasi, implementasi, M&E, dan digital policy LKP-06–LKP-09	25%	Notula, RACI, risk register, ToC, canvas
Policy pitch dan portofolio final LKP-10	10%	Deck, rekaman, rubrik panel, indeks bukti
Refleksi etika, AIK, kontribusi, dan perbaikan	5%	Jurnal refleksi dan penilaian diri/sejawat

5.3 Rubrik analitik umum

Kriteria	4 — Unggul	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang
Definisi masalah	Jelas, netral, terukur; sebab-dampak dan batas masalah sangat kuat.	Jelas dan cukup terukur; hubungan sebab-dampak sebagian besar tepat.	Masih bercampur dengan solusi/gejala; batas kurang jelas.	Tidak jelas, bias, atau tanpa dasar.
Bukti dan metode	Sumber beragam, sah, mutakhir; mutu/bias/keterbatasan dinilai; proses tertelusur.	Sumber relevan dan cukup; keterbatasan disebut; jejak analisis memadai.	Bukti terbatas; evaluasi mutu dan keterlacakan lemah.	Klaim tanpa bukti atau data tidak dapat diverifikasi.
Alternatif dan rekomendasi	Opsi berbeda; kriteria transparan; trade-off/distribusi/risiko dianalisis; rekomendasi operasional.	Opsi dan kriteria memadai; rekomendasi cukup layak dengan mitigasi dasar.	Opsi kurang berbeda; skoring dangkal; rekomendasi umum.	Solusi tunggal tanpa perbandingan atau tidak layak.
Pemerintahan dan implementasi	Kewenangan, aktor, peran, sumber daya, risiko, indikator, dan akuntabilitas terintegrasi.	Unsur implementasi utama tersedia meski beberapa detail belum kuat.	Peran/sumber daya/risiko tidak lengkap.	Tidak memperhatikan kewenangan dan implementasi.

Kriteria	4 — Unggul	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang
Komunikasi	Ringkas, logis, berorientasi audiens; visual tepat; mampu menjawab kritik dengan bukti.	Struktur jelas dan komunikatif; respons cukup berbukti.	Pesan kurang fokus; visual/sitasi atau respons lemah.	Sulit dipahami, menyesatkan, atau tidak sesuai audiens.
Etika, AIK, inklusi, dan data	Amanah, adil, transparan; kelompok rentan dipertimbangkan; data/AI dikelola dan diungkapkan dengan benar.	Memenuhi unsur etik utama dengan kekurangan kecil.	Pertimbangan etik/inklusi/data ada tetapi tidak konsisten.	Pelanggaran integritas, privasi, diskriminasi, atau AI tidak diungkapkan.
Kolaborasi dan refleksi	Peran seimbang; kontribusi tertelusur; konflik dikelola; refleksi kritis menghasilkan perbaikan.	Kolaborasi baik dan refleksi relevan.	Kontribusi tidak merata; refleksi deskriptif.	Tidak kooperatif atau tidak ada refleksi.

Konversi: skor akhir = Σ (skor tingkat/4 $\times$ bobot kriteria). Dosen dapat menambahkan indikator khusus, tetapi tidak boleh menghilangkan integritas, bukti, dan keterlacakan proses.

5.4 Pengukuran ketercapaian

Tahap	Cara	Bukti
Diagnostik	Pre-test dan pemetaan pengalaman/kebutuhan akses.	Skor awal dan rencana dukungan
Formatif	Checkpoint, review sejawat, klinik, dan umpan balik dosen/mitra.	Catatan dan versi revisi
Sumatif	Produk final, simulasi/pitch, portofolio, dan post-test.	Rubrik, skor, produk, rekaman
Agregasi	Nilai indikator rubrik dipetakan ke CPMK/CPL dan dianalisis per kelas/semester.	Matriks pemetaan dan rekap
Moderasi	Sampling produk dan kalibrasi antarpemilai untuk menjaga konsistensi.	Berita acara moderasi
Tindak lanjut	Capaian rendah dianalisis; kasus, metode, waktu, rubrik, fasilitas, atau dukungan diperbaiki.	RTL dan bukti efektivitas

TARGET KENDALI INTERNAL Sebagai target awal, sekurang-kurangnya 75% peserta diharapkan mencapai skor ≥ 75 pada capaian utama. Target final mengikuti standar akademik dan RKT yang disahkan; hasil aktual wajib dilaporkan apa adanya dan ditindaklanjuti.

BAB VI — ETIKA, DATA, AI, AKSESIBILITAS, DAN KESELAMATAN

6.1 Etika pemerintahan dan nilai AIK

Setiap kegiatan mengarusutamakan amanah, keadilan, musyawarah, kemaslahatan, kejujuran ilmiah, penghormatan martabat manusia, antikorupsi, tanggung jawab terhadap dampak, dan keberpihakan yang beralasan kepada kelompok rentan. Nilai AIK tidak ditempatkan sebagai slogan, tetapi diterjemahkan ke dalam pilihan masalah, transparansi metode, perlakuan terhadap partisipan, distribusi manfaat-beban, dan akuntabilitas rekomendasi.

6.2 Integritas akademik dan penggunaan AI

Diperbolehkan dengan pengungkapan	Dilarang/harus dicegah
Brainstorming pertanyaan, penyuntingan bahasa, struktur awal, atau pembuatan alternatif yang kemudian diuji dan diverifikasi.	Mengunggah data pribadi/rahasia, dokumen mitra terbatas, kredensial, atau informasi yang tidak berhak dibagikan.
Membantu kode analisis/visualisasi dengan verifikasi data, metode, dan hasil oleh pengguna.	Menyajikan keluaran AI sebagai fakta/sumber; membuat sitasi, data, wawancara, regulasi, atau bukti fiktif.
Meringkas bahan yang pengguna berhak akses sambil memeriksa ulang konteks dan kutipan.	Menggunakan AI untuk menggantikan capaian esensial yang harus diperagakan mahasiswa atau untuk menyamarkan plagiarisme.
Mencatat alat, tanggal, tujuan, prompt ringkas, bagian yang dipengaruhi, cara verifikasi, dan revisi manusia.	Menyembunyikan penggunaan AI atau mengabaikan bias, keamanan, hak cipta, dan dampak diskriminatif.

6.3 Tata kelola data

1. Gunakan data minimum yang diperlukan dan catat dasar akses/pemrosesan.
2. Pisahkan data mentah, data kerja, dan produk publik; dokumentasikan transformasi.
3. Anonimkan/pseudonimkan identitas serta batasi akses berdasarkan peran.
4. Simpan pada repositori resmi, gunakan penamaan versi, backup, dan kontrol unduhan.
5. Nyatakan sumber, tahun, unit, metode, lisensi/izin, dan keterbatasan.
6. Tetapkan jadwal retensi, pemusnahan, dan prosedur respons insiden.

6.4 Aksesibilitas dan akomodasi yang layak

- Materi tersedia dalam format digital yang dapat dibaca, struktur heading, tabel sederhana, teks alternatif/uraian visual, dan kontras memadai.
- Pengelola menyediakan jalur masuk, tempat duduk, tata ruang, waktu, alat bantu, pendamping, atau metode alternatif sesuai asesmen kebutuhan.
- Video memiliki transkrip/caption; instruksi disampaikan lisan dan tertulis; file dapat diakses sebelum kegiatan.
- Alternatif asesmen diperbolehkan sepanjang capaian esensial tetap sama.
- Kebutuhan akomodasi dijaga kerahasiaannya dan tidak menjadi dasar diskriminasi.

6.5 Keselamatan dan penanganan insiden

Risiko	Pencegahan	Respons
--------	------------	---------

Risiko	Pencegahan	Respons
Listrik/perangkat/ergonomi	Inspeksi kabel, beban listrik, posisi kerja, ventilasi, dan waktu istirahat.	Hentikan penggunaan, amankan area, laporkan, verifikasi kelayakan.
Kebakaran/gempa/keadaan darurat	Orientasi jalur evakuasi, titik kumpul, APAR/P3K, kapasitas ruang.	Ikuti prosedur darurat universitas dan catat insiden/near miss.
Keamanan data/akun	Kata sandi kuat, hak akses minimal, backup, perangkat resmi, screen privacy.	Isolasi akun/perangkat, laporkan, nilai dampak, pulihkan, dan tindak lanjuti.
Konflik/pelecehan/diskriminasi	Aturan forum, fasilitasi aman, kanal pengaduan, perlindungan kelompok rentan.	Hentikan tindakan, lindungi pihak terdampak, laporkan melalui mekanisme resmi.
Kegiatan lapangan	Izin, asesmen lokasi, komunikasi, transportasi, cuaca, kontak darurat, dan persetujuan.	Aktifkan PIC, dokumentasikan, beri pertolongan/rujukan sesuai kebutuhan.

BAB VII — LUARAN, REPOSITORI BUKTI, DAN PPEPP

7.1 Luaran

Kategori	Contoh luaran	Indikator pemanfaatan
Pembelajaran	Policy brief/memo, peta aktor, evidence matrix, matriks alternatif, pitch, portofolio.	Ketercapaian CPL/CPMK, mutu rubrik, revisi, diseminasi.
Penelitian	Dataset terdokumentasi, instrumen, analisis, artikel, poster, prosiding.	Keterlibatan mahasiswa, publikasi, sitasi/presentasi, tindak lanjut.
PkM	Rekomendasi mitra, toolkit, pelatihan, desain layanan/kebijakan.	Validasi, adopsi, perubahan pengetahuan/praktik, keberlanjutan.
Inovasi	Digital policy canvas, prototype, dashboard, model Smart Village.	Uji pengguna, perbaikan, pilot, replikasi, dukungan mitra.
Jejaring	FGD, policy expo, klinik, kuliah praktisi, IA/MoA.	Partisipasi, tindak lanjut, kepuasan, aktivitas berulang.

7.2 Indeks bukti minimum per kegiatan

Kode	Kelompok	Bukti
01	Perencanaan	RPS; modul; pemetaan CPL/CPMK; jadwal; surat tugas; permohonan penggunaan
02	Kesiapan	Case pack; data/sumber; checklist ruang/peralatan; akun; asesmen risiko; akomodasi
03	Pelaksanaan	Daftar hadir; logbook; dokumentasi; catatan bimbingan; notula; rekaman/screenshot
04	Produk	Lembar kerja; produk antara; produk final; metadata; versi aksesibel
05	Asesmen	Rubrik; skor; umpan balik; moderasi; rekap CPMK/CPL; pre/post-test
06	Mitra	IA/MoA/surat; validasi; testimoni; matriks tanggapan; bukti pemanfaatan
07	Evaluasi	Survei pengguna; evaluasi dosen/mitra; analisis capaian; temuan/akar masalah
08	Tindak lanjut	RTL; PIC; tenggat; bukti penyelesaian; verifikasi efektivitas; revisi modul/RPS

PENAMAAN FILE Gunakan pola IP-LKP_[tahun-semester]_[kodeMK]_[kodeModul]_[jenisBukti]_[kelompok/nama]_[versi]_[tanggal].ext. Contoh: IP-LKP_2026-1_IP009_LKP05_PolicyBrief_Kel03_v2_20261015.pdf.

7.3 Metadata dan hak akses

Metadata wajib	Isi
Identitas	Judul, kode modul/mata kuliah, semester, penulis, dosen, mitra, tanggal, versi.
Keterkaitan	CPL/CPMK/Sub-CPMK, kegiatan tridarma, peta jalan, dan tema keilmuan.
Sumber/metode	Dataset, regulasi, literatur, instrumen, perangkat lunak, metode analisis.

Metadata wajib	Isi
Integritas	Pernyataan sitasi, hak cipta, penggunaan AI, konflik kepentingan, etik/izin.
Akses	Publik, internal, terbatas, atau rahasia; pemilik; pihak yang berwenang; masa retensi.
Status	Draf, direviu, direvisi, final, diseminasi, dimanfaatkan, ditutup.

7.4 PPEPP

Tahap	Tindakan	Rekaman mutu
Penetapan	Menetapkan modul, SOP, capaian, rubrik, jadwal, target, fasilitas, risiko, mitra, dan indeks bukti.	SK/modul/RPS/RKT/SOP/rubrik
Pelaksanaan	Melaksanakan orientasi, praktikum, klinik, simulasi, penelitian/PkM, asesmen, dan pengarsipan.	Log, presensi, produk, dokumentasi
Evaluasi	Menganalisis penggunaan, ketercapaian, mutu produk, kepuasan, aksesibilitas, insiden, mitra, dan pemanfaatan.	Rekap, survei, monev, AMI
Pengendalian	Menetapkan akar masalah, tindakan korektif, PIC, sumber daya, tenggat, dan verifikasi.	Notula/RTM, RTL, bukti selesai
Peningkatan	Menaikkan standar, memperbaiki kasus/data/perangkat, memperluas mitra, dan merevisi modul/RPS/rubrik.	Versi baru, target baru, bukti efektivitas

7.5 Indikator kinerja operasional

Indikator	Rumus/sumber	Frekuensi	Tindak lanjut bila belum tercapai
Keterpakaian laboratorium	$\text{Sesi terealisasi} \div \text{sesi direncanakan} \times 100\%$; jadwal/log	Semester	Analisis benturan jadwal, akses, fasilitas, atau integrasi RPS.
Kelengkapan bukti	$\text{Kegiatan dengan 8 kelompok bukti lengkap} \div \text{total kegiatan} \times 100\%$	Semester	Pemulihan arsip dan perbaikan alur serah bukti.
Ketercapaian capaian	$\text{Peserta mencapai ambang} \div \text{peserta dinilai} \times 100\%$; rubrik/rekap	Semester	Remediasi dan perbaikan kasus, metode, waktu, atau rubrik.
Mutu produk	Distribusi level rubrik dan hasil moderasi	Semester	Klinik tambahan, contoh standar, kalibrasi penilai.
Kepuasan dan akses	Survei mahasiswa/dosen/mitra; keluhan/akomodasi	Semester	Perbaikan layanan, fasilitas, format, dan respons.
Pemanfaatan mitra	Produk yang divalidasi/diadopsi/ditindaklanjuti	Tahunan	Perkuat co-design, format produk, dan mekanisme serah terima.
Produktivitas tridarma	Kegiatan/luaran penelitian dan PkM berbasis laboratorium	Tahunan	Integrasi roadmap, hibah, pembimbingan, dan kemitraan.
Keamanan/insiden	Jumlah insiden/near miss, waktu respons, penyelesaian RTL	Semester	Koreksi kontrol, sosialisasi, pemulihan, dan uji efektivitas.

LAMPIRAN — LEMBAR KERJA DAN FORMULIR

Lampiran dapat disalin untuk setiap kelompok/kegiatan. Ruang jawaban dapat diperluas di Word atau repositori digital tanpa mengubah label dan metadata wajib.

Lampiran 1 — Identitas dan Logbook Praktikum

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
Tanggal/waktu	
Kode modul/mata kuliah	
Kelompok/anggota	
Dosen/fasilitator	
Kasus/mitra	
Tujuan sesi	
Aktivitas dan kontribusi anggota	
Kendala/risiko	
Keputusan dan tindak lanjut	
Lokasi bukti/tautan	

Lampiran 2 — Problem Statement dan Issue Tree

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
Gejala	
Masalah inti	
Penyebab langsung	
Penyebab struktural	
Dampak	
Kelompok terdampak	
Wilayah/periode	
Kewenangan	
Indikator baseline	
Sumber/keterbatasan	
Rumusan masalah final	

Lampiran 3 — Matriks Aktor

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
Aktor	
Mandat/kewenangan	
Kepentingan	
Pengaruh	
Keterdampakan	
Posisi	
Sumber daya	
Risiko konflik	
Strategi pelibatan	
Bukti	

Lampiran 4 — Evidence Matrix

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
Pertanyaan	
Sumber/tahun	
Jenis/metode	
Temuan	
Relevansi	
Validitas/reliabilitas	
Bias/keterbatasan	
Status akses	
Keputusan penggunaan	
Tautan/kode arsip	

Lampiran 5 — Matriks Alternatif

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
Alternatif	
Instrumen	
Efektivitas	
Efisiensi	
Keadilan	
Legalitas	
Kelayakan	
Risiko	
Keberlanjutan	
Total/alasan	
Analisis distribusi	

Lampiran 6 — Kerangka Policy Brief

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
Judul dan audiens	
Keputusan yang diminta	
Ringkasan eksekutif	
Masalah dan urgensi	
Bukti kunci	
Alternatif	
Rekomendasi	
Implementasi	
Risiko/mitigasi	
Indikator	
Referensi	
Pengungkapan AI/konflik	

Lampiran 7 — Matriks Tanggapan Konsultasi

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
No.	
Aktor/kelompok	
Masukan	
Bukti/alasan	
Status: terima/sebagian/tolak/perlu data	
Tanggapan	
Perubahan dokumen	
Penanggung jawab	

Lampiran 8 — Risk Register

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
ID	
Tujuan/proses	
Penyebab	
Peristiwa risiko	
Dampak	
Probabilitas	
Severity	
Kontrol	
Level sisa	
Mitigasi	
Pemilik	
Tenggat	
Sinyal dini	
Status	

Lampiran 9 — Matriks Monitoring dan Evaluasi

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
Pertanyaan evaluasi	
Indikator	
Definisi/rumus	
Baseline	
Target	
Disaggregasi	
Sumber	
Metode	
Frekuensi	
PIC	
Risiko data	
Pemanfaatan	

Lampiran 10 — Deklarasi Penggunaan AI

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
Nama alat/versi	
Tanggal	
Tujuan penggunaan	
Bagian yang dipengaruhi	
Prompt/kegiatan ringkas	
Data yang dimasukkan	
Cara verifikasi	
Kesalahan/bias ditemukan	
Revisi manusia	
Pernyataan tanggung jawab	

Lampiran 11 — Indeks Bukti Kegiatan

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
Kode bukti	
Judul	
Jenis	
Kode modul/mata kuliah	
CPL/CPMK	
Pemilik	
Tanggal/versi	
Hak akses	
Lokasi/tautan	
Status review	
Tindak lanjut	

Lampiran 12 — Evaluasi Pengguna dan RTL

Identitas	Nama/kelompok: _____ Semester: _____ Tanggal: _____
Elemen	Isian
Aspek	
Skor 1–4	
Bukti/komentar	
Temuan	
Akar masalah	
Tindakan	
PIC	
Tenggat	
Status	
Verifikasi efektivitas	

DAFTAR PUSTAKA DAN ACUAN

Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (6th ed.). CQ Press.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes* (4th ed.). Oxford University Press.

Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning* (3rd ed.). Routledge.

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (6th ed.). Routledge.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Program Studi pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor dalam Cakupan LAMSPAK.

LAMSPAK. Instrumen Akreditasi Program Studi yang berlaku. <https://www.lamspak.id/akreditasi/instrumen/>

Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan UMS Rappang. Kurikulum, RPS, peta jalan laboratorium, SOP, dan dokumen SPMI yang berlaku.

PENUTUP

Buku Modul Laboratorium Kebijakan Publik ini menempatkan laboratorium sebagai ekosistem pembelajaran, penelitian, PkM, inovasi, dan penjaminan mutu yang berbasis bukti. Sepuluh unit praktikum membentuk alur utuh dari diagnosis masalah sampai diseminasi dan pemanfaatan rekomendasi.

Kekuatan modul terletak pada konsistensi implementasi: keterhubungan dengan RPS dan CPL, mutu kasus/data, fasilitasi yang inklusif, penilaian autentik, integritas akademik, keamanan data, penggunaan sarana, pelibatan mitra, repositori bukti, serta tindak lanjut PPEPP. Oleh karena itu, setiap semester program studi wajib menelaah bukan hanya kelengkapan artefak, tetapi juga kualitas hasil, manfaat, dan efektivitas perbaikannya.

Dengan pelaksanaan yang disiplin dan reflektif, Laboratorium Kebijakan Publik diharapkan memperkuat lulusan Ilmu Pemerintahan yang mampu berpikir kritis, bekerja kolaboratif, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta menghasilkan kebijakan yang adil, layak, dan berdampak bagi masyarakat.

STATUS DOKUMEN Versi 1.0 — siap ditetapkan. Tinjauan tahunan wajib mencatat perubahan, dasar perubahan, penanggung jawab, tanggal berlaku, dan bukti sosialisasi.